

TAJUK RENCANA

Waspada Ancaman Bencana

SEJUMLAH wilayah di DIY dan Jawa Tengah beberapa hari ini dilanda hujan lebat dan angin kencang, sehingga kerusakan merebak di beberapa daerah, yakni banjir, tanah longsor, bangunan rusak, dan pohon tumbang. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga telah mengingatkan bahwa hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah tempat dalam beberapa hari terakhir perlu diwaspadai.

Seperti diungkapkan Kepala Kelompok Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sleman, Etik Setyaningrum MSi, dari hasil pengamatan dan prakiraan iklim di wilayah DIY, bulan Januari sampai Februari 2021 merupakan periode puncak musim hujan. Intensitas curah hujan bulanan bisa di atas 300 milimeter perbulan. Dalam puncak musim penghujan, biasanya potensi cuaca ekstrem cenderung meningkat, bahkan mungkin terjadi hujan kategori lebat hingga sangat lebat.

Menurut Etik, faktor-faktor pengendali iklim di wilayah Indonesia saat ini yang sedang aktif berpengaruh adalah Monsoon Asia. Adanya daerah Konvergensi Antar Tropis (ITCZ) memperlihatkan anomali yang mengarah pada penguatan curah hujan tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia termasuk DIY. Fenomena La Nina saat ini juga masih aktif dan diprediksi indeks

mengarah ke kondisi normal baru pada bulan Mei 2021.

Mengingat Februari ini masih masuk kategori puncak musim hujan, Etik Setyaningrum mengharapkan masyarakat mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem, terutama berkaitan dengan bencana hidrometeorologi. Di antaranya hujan sedang sampai lebat disertai petir dan angin kencang. Bencana alam yang mendadak dan sulit diprediksikan harus menjadi perhatian masyarakat. Khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah perbukitan atau bantaran sungai.

Dalam kondisi cuaca ekstrem saat ini, kewaspadaan memang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi saat ini juga ada ancaman bencana tanah bergerak, seperti terjadi di tebing Losari, Wukirharjo Prambanan. Akibatnya, rumah 6 kepala keluarga terancam. Sementara itu sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan, selama ini sudah beberapa kali terjadi tanah bergeser.

Ancaman bencana akibat hujan deras disertai petir dan angin kencang di DIY dan Jawa Tengah saat ini memang menuntut kewaspadaan tinggi dari masyarakat. Harus ekstra waspada. Juga sangat diperlukan kesiapsiagaan pemerintah daerah. Tentunya ancaman virus Korona dan pandemi Covid-19 juga tetap harus diwaspadai. □

Belajar dari Kasus Dinar dan Dirham

Abdul Qoyum

KASUS penggunaan alat tukar dinar dan dirham (atau boleh disebut emas dan perak) di Pasar Muamalah menarik untuk dibahas. Fakta hukum mungkin sudah jelas bahwa di dalam Pasal 21 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memang menjelaskan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya. Namun munculnya banyak narasi lain yang beredar juga membuat kasus ini lebih menarik perhatian publik.

Narasi-narasi tersebut nampaknya berusaha menggiring opini publik bahwa seolah transaksi dengan dinar dan dirham adalah aturan syariah yang mengikat. Ada juga narasi bahwa penggunaan dinar dan dirham adalah bagian pokok dalam ber-ekonomi syariah Sehingga jika pemerintah bisa menerima ekonomi syariah harusnya juga menerima dinar dan dirham.

Nostalgia Sejarah

Tidak kita pungkiri bahwa banyak juga penggerak ekonomi syariah yang menganggap bahwa sistem uang yang saat ini berjalan yang berbasis kepada fiat money, fractional reserve requirement dan interest rate adalah sangat tidak menyehatkan bagi perekonomian (Meera AK 2009; Vadillo, UI 1996). Banyak fakta akademik yang telah dihadirkan untuk membuktikan ini, bahkan dari kalangan ekonom yang besar di negara penganut kapitalisme sekalipun, seperti Lietaer, B. (2001), dan Greco, T.H. (2001).

Namun demikian ada beberapa orang yang memang berpandangan secara ekstrim bahwa penggunaan uang kertas adalah termasuk riba, sehingga haram dan tidak sah digunakan untuk tujuan transaksi ekonomi, termasuk membayar zakat. Bagi mereka dinar



KR-JOKO SANTOSO

dirham sebagaimana yang pernah digunakan dalam Islam (padahal dinar dan dirham juga bukan uang asli dari Islam). Pandangan kami, dalam ranah akademik hal seperti ini biasa dilakukan atau disampaikan. Bahkan dalam konteks ini, ada juga peneliti di Bank Indonesia yang juga melakukan kajian. Artinya, berbicara alternatif uang kertas itu bukanlah hal yang aneh.

Kita boleh berdebat soal uang kertas versus dinar dan dirham. Tetapi fakta hukumnya baik hukum syariah

maupun hukum positif menyebutkan bahwa uang kertas adalah alat pembayaran yang sah.

Lebih Adil

Faktanya, kita memang hidup di negara yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945, maka setiap transaksi ekonomi syariah harus kita jalankan sesuai dengan UU. Fakta hari ini sebenarnya menunjukkan bahwa ekonomi syariah dijalankan dengan sangat baik di negeri ini dengan skema regulasi yang sangat baik. Bahwa ada suara sumbang dari beberapa orang bahwa pemerintah sekarang anti syariah menurut saya adalah batu sandungan dalam pembangunan ekonomi syariah ke depan.

Memang akan terasa lebih adil dan bijak jika terkait dengan kasus penggunaan dinar dan dirham di Pasar Muamalah di Depok pemerintah rasanya juga perlu lebih adil dengan meniadakan seluruh transaksi yang bertentangan dengan undang-undang. Saya kira kita semua sepakat bahwa penggunaan mata uang lain selain Rupiah di negeri ini memang harus ditindak, karena itu soal kedaulatan. Tetapi, jangan sampai ada kesan bahwa beraninya hanya dengan kelas recehan seperti di Pasar Muamalah Depok.

**) Abdul Qoyum, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Hari Pers Nasional

PERJALANAN sejarah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari dilatarbelakangi peringatan hari jadi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 Hari Pers Nasional dilaksanakan secara bersama antara komponen pers, masyarakat, dan pemerintah. Landasan ideal HPN merupakan sinergi. Sinergi antarkomponen pers, masyarakat, dan pemerintah dapat berjalan dengan seimbang. Berbicara soal pers dan HPN, bagaimana ulang tahun ini dapat muncul awalnya? Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, HPN telah digodok sebagai salah satu butir keputusan kongres ke-28 PWI yang dilaksanakan di kota Padang, Sumatera Barat, pada tahun 1978.

Kesepakatan tersebut terlepas dari kehendak masyarakat untuk menetapkan satu hari bersejarah untuk memperingati peran dan juga keberadaan pers secara nasional.

Selain itu dalam sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung pada 19 Februari 1981 kehendak tersebut akhirnya disetujui oleh Dewan Pers untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah sekaligus menetapkan penyelenggaraan HPN. Selanjutnya proses adanya HPN ini memang panjang. Na-

mun hasilnya tidak sia-sia setelah sekitar 7 tahun berlalu, akhirnya pada 9 Februari ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai Hari Pers Nasional. Saat itu Indonesia dalam era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Peran dari penggiat berita bagi masyarakat sangat bermanfaat yakni pertama, bahwa keberadaan pers bisa menjembatani suara masyarakat dalam melihat kondisi berbagai keadaan, sehingga dengan hadirnya para wartawan menjadi penyambung suara rakyat yang pada akhirnya bisa dibaca dan diserap bagi yang berkepentingan dengan keadaan saat itu. Kedua, menumbuhkan budaya literasi di masyarakat. Budaya literasi ini sangat perlu dikembangkan agar para generasi kita tidak gagap dalam hal ini. Maka dalam penyajian berita itu tentu telah ditulis dan diterbitkan melalui proses yang panjang dan dijamin benar, akurat dan lengkap (BAL). Ketika etika BAL ini dijunjung tinggi oleh para penggiat berita, nantinya media tersebut akan dipercaya lebih oleh masyarakat. Bahwa berita-berita yang ditampilkan baik di media cetak maupun online bisa dijadikan rujukan untuk penyambung suara rakyat. Selamat Hari Pers Nasional 2021. □

Ismunandar, Mahasiswa MPAl UAD.

Investor Kesehatan dan Vaksin Berbayar

PENGUSAHA/INVESTOR kesehatan asing dan domestik berharap kepada pemerintah agar dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19. Akses yang diminta pengusaha yang tergabung di bawah payung Kadin Indonesia bertujuan mempercepat akselerasi vaksinasi di negeri ini. Sebagaimana ditegaskan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani, apabila dunia usaha dibukakan akses dalam vaksinasi virus Korona, diyakini hal itu akan mempercepat perolehan manfaat pelaksanaan vaksinasi. Apalagi vaksinasi Covid-19 yang melalui jalur mandiri semuanya menjadi tanggung jawab perusahaan alias karyawan mendapatkan vaksinasi secara gratis.

Menurutnya, perusahaan yang dianggap mampu tidak tertutup kemungkinan juga memberikan vaksinasi mandiri kepada keluarga karyawan secara gratis. Pihak Kadin menilai pelaksanaan vaksinasi jauh lebih efisien bagi perusahaan ketimbang menggelar rapid test antigen atau tes PCR secara rutin kepada karyawan yang biasanya dilaksanakan dua minggu sekali atau sekali sebulan. Lebih khusus lagi bila program vaksinasi virus korona dilaksanakan lebih cepat, dampak pada pemulihan perekonomian nasional bisa segera terwujud.

Mandiri

Walau pemerintah belum memberikan akses kepada pengusaha untuk berpartisipasi pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri, pemerintah telah memberi sinyal positif. Tawaran vaksinasi mandiri (baca: berbayar pada kelompok tertentu-red), dari kalangan pengusaha diapresiasi secara baik oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Menkes meyakini vaksinasi ataupun program pemerintah lainnya sulit berhasil dengan cepat dan baik tanpa partisipasi masyarakat luas, khususnya kalangan dunia usaha/investor. Hal ini juga jamak dilakukan di

Tasroh

banyak negara maju.

Menkes menggarisbawahi bahwa prinsip utama dalam program vaksinasi Covid-19 adalah diberikan gratis (khususnya kalangan strategis nasional dan kaum marginal) yang dilaksanakan secara masif dan cepat untuk membentuk kekebalan komunal. Karena kebijakan vaksinasi gratis, jangan sampai ada pihak tertentu mengambil keuntungan atau terjadi rente ekonomi. Narasi yang harus dibangun adalah kegotong-royongan segenap komponen bangsa.

Program vaksinasi Covid-19 harus dilaksanakan cepat, tetap harus konsisten dengan jadwal dan penahapan yang sudah dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah sesuai dengan standar WHO. Berdasarkan urutan prioritas anak bangsa yang harus mendapatkan vaksinasi secepatnya.

Namanya pengusaha daya cium terhadap peluang 'bisnis' tentu begitu tajam. Selain meminta pemerintah membukakan akses untuk vaksinasi mandiri secara gratis, rupanya mereka juga mengajukan izin untuk melaksanakan vaksinasi mandiri yang berbayar untuk dijual kepada publik. Memang fakta lapangan sejak pemerintah memulai vaksinasi yang masih terbatas pada petugas kesehatan dan TNI/Polri.

Berbayar

Bagaimana dengan soal harga vaksin berbayar? Soal harga, sebagaimana dituturkan Rosan P Roeslani, pihaknya akan tunduk pada aturan yang dikeluarkan pemerintah semisal pemerintah menetapkan tarif batas atas. Walau lampu hijau belum dinyalakan untuk vaksinasi mandiri yang berbayar, pemerintah sudah membocorkan se-

dikit persyaratan, yakni untuk merek vaksin mandiri berbayar harus berbeda dengan vaksin gratis yang menjadi program pemerintah..

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sudah menasar sebanyak 179.000 orang hingga 25 Januari 2021. Adapun jadwal dan penahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi petugas kesehatan sebanyak 1,3 juta orang, petugas publik sebanyak 17,4 juta orang, dan 21,5 juta orang lanjut usia (lansia). Diharapkan periode vaksinasi untuk tahap pertama itu berlangsung dari Januari hingga April 2021.

Melihat angka orang yang harus divaksinasi dalam waktu cepat begitu banyak, pemerintah tak boleh mengabaikan permintaan pengusaha yang berniat baik untuk berpartisipasi. Dengan catatan harus dibuatkan regulasi yang jelas sebagai aturan main sehingga tidak ada area abu-abu yang bisa dimanfaatkan untuk meraih keuntungan semata. □

**) Tasroh SS MSA MSc, Tim Pengembangan Investasi Daerah dan Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan*

Pojok KR

Untuk mengurangi faktor risiko, kanker dapat ditekan sampai 40 persen.
-- Butuh kesadaran. ***
Pandemi Covid-19 tidak menghentikan pelayanan publik di Jawa Tengah.
-- Ada inovasi. ***
Beberapa wilayah di DIY dan Jawa Tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor.
- Ancaman lagi.

Berabs

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019).
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lamparasari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banjarmasin : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdandi, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afiaty, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk23@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) ... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.